

**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA DI LUAR NEGERI**

**NAMA : ANA MARLIANA**

**NIM : 30301207708**

---

**ABSTRAK**

Upaya yang merupakan alternatif untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kerja adalah dengan menempatkan tenaga kerja keluar negeri. Penempatan jasa kerja ke luar negeri dengan mekanisme yang sudah diatur baik melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Keputusan Menteri Tenaga Kerja di anggap sebagai salah satu upaya efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan kerja yang sama bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri menimbulkan masalah, sebab tenaga kerja tidak memiliki perlindungan ketika tenaga kerja tersebut mendapatkan masalah di negara tempat tenaga kerja bekerja. Perlunya peran serta dari masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang di tempatkan ke luar negeri. Sehubungan dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja ke luar negeri perlu digambarkan bahwa kondisi saat ini penempatan tenaga kerja ke luar negeri masih di dominasi tenaga kerja sektor informal, khususnya pinata laksana rumah tangga (PLRT) sering juga disebut dengan tenaga kerja wanita (TKW). Tetapi pengiriman TKI ke luar negeri tersebut tidaklah memberikan sumbangan yang sedikit bagi negara.

Didalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri berdasarkan UU No. 39 Th. 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan bagi TKI di Luar Negeri. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri serta Apa yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri dan bagaimana solusi untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis Pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis sosiologis adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peranan intelkam dalam mengantisipasi konflik sosial.

Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan hukum bagi TKI yang akan di tempatkan ke luar negeri sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

belum sepenuhnya terlaksana, karena masih terdapat beberapa perkara yang menunjukkan adanya percobaan untuk menempatkan TKI ke luar negeri tidak melalui mekanisme sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yaitu mencoba menempatkan TKI dengan cara perorangan, sehingga perbuatan pidana tersebut diancam dengan sanksi pidana di bidang penempatan TKI ke luar negeri.

Alangkah baiknya bagi TKI yang sedang bekerja di luar negeri, ketika sedang mengalami permasalahan dengan majikan atau pengguna jasa dalam pemenuhan hak-hak TKI, hendaknya melaporkan hal tersebut pada pemerintah Indonesia yang berada di tempat tujuan TKI bekerja. Meningkatkan seleksi atau penelitian dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk kelengkapan para TKI. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan bagi para TKI yang akan bekerja, sehingga para TKI siap untuk diterjunkan.

*Kata Kunci: Perlindungan TKI di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.*